

**HUBUNGAN PERANAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT
(POKMAS) DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI (RSMW) DI KECAMATAN
TUMIJAJAR KABUPATEN TULANGBAWANG BARAT**

(Skripsi)

**Oleh
SYANI A AL KAUTZAR**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**RELATION BETWEEN THE ROLE OF COMMUNITY GROUPS
OFFICIALS AND THE LEVEL OF COMMUNITY PARTICIPATION IN
RAGEM SAI MANGI WAWAI PROGRAM IN TUMIJAJAR DISTRICTS
TULANGBAWANG BARAT REGENCY**

ABSTRACT

By

Syani A Alkautzar

This study aims to: (1) determine the role of community groups officials in Tumijajar Districts, Tulangbawang Barat Regency which take part in Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) program, (2) determine the level of community participation in Tumijajar Districts, Tulangbawang Barat Regency in RSMW program, (3) determine the relation between the role of community groups officials and the level of community participation in RSMW program in Tumijajar Districts Tulangbawang Barat Regency. This research was conducted in Tumijajar Districts Tulangbawang Barat Regency in September 2014. The respondents of this research was 100 community member which spread over 10 villages in Tumijajar Districts and 50 community groups officials which 5 of them are taken from each village. The result of this research was: (1) the role of community group in the RSMW program was categorized as medium (quite good), (2) the level of community participation in RSMW Program are categorized as medium (quite good), and (3) there is a real relationship between the role of community groups officials and the level of community participation in RSMW program, the better the role of the community groups officials, the better the level of community participation in RSMW Program.

Keywords: community groups, role, RSMW Program, participation

**HUBUNGAN PERANAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT
(POKMAS) DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI (RSMW) DI KECAMATAN
TUMIJAJAR KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

ABSTRAK

Oleh

Syani A Alkautzar

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui peranan pengurus kelompok masyarakat (POKMAS) di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW), (2) mengetahui tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW), dan (3) mengetahui hubungan antara peranan POKMAS dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program RSMW di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada bulan September 2014. Sampel yang diambil adalah 100 responden masyarakat yang tersebar di 10 kampung yang berada di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan 50 Anggota POKMAS dengan jumlah 5 anggota pokmas perkampung yang ada di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hasil penelitian menunjukkan, (1) peranan POKMAS dalam program RSMW di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam kategori sedang, (2) tingkat partisipasi masyarakat dalam program RSMW di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam kategori sedang, (3) terdapat hubungan yang nyata antara peranan POKMAS dan tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program RSMW, semakin baik peranan POKMAS maka akan semakin baik tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan program RSMW di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kata kunci : RSMW, POKMAS, Peranan, Partisipasi

**HUBUNGAN PERANAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT
(POKMAS) DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PROGRAM RAGEM SAI MANGI WAWAI (RSMW) DI KECAMATAN
TUMIJAJAR KABUPATEN TULANGBAWANG BARAT**

**Oleh
SYANI A AL KAUTZAR**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PERTANIAN**

pada

**Jurusan Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

**HUBUNGAN PERANAN PENGURUS
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
DAN TINGKAT PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PROGRAM
RAGEMSAI MANGI WAWAI (RSMW) DI
KECAMATAN TUMIJAJAR KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT.**

Nama Mahasiswa

Syani Ahmad Alkautzar

Nomor Pokok Mahasiswa

: 0914023147

Jurusan

: Agribisnis

Fakultas

: Pertanian

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi., M.S.

NIP 19550718 198103 1 004

Ir. Indah Nuramayasari., M.Sc.

NIP 19610914 198503 2 001

2. Ketua Jurusan / Program Studi

Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.P.

NIP 19630203 198902 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S.

Sekretaris

: Ir. Indah Nurmayasari, M.Sc.

Penguji

Bukan Pembimbing

: Dr. Ir. Dewangga Nikmatullah, M.S.

2. Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si

NIP. 19611020 198603 1 002

Tanggal Lulus Skripsi : 30 Desember 2016

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sukadana Lampung Timur pada tanggal 25 Juni 1991. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Syamsul Bahri, SH, dan Ibu Isnani Almawati, SE. Penulis pertama kali mengenal dunia pendidikan di Taman Kanak-kanak Aisyiah Sukadana 1996. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 5 Sukadana Pasar 1997, SMP Negeri 1 Sukadana pada tahun 2003, dan SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2006.

Tahun 2009 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Ujian Mandiri Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian sebagai sekretaris pengembangan masyarakat (2012) dan Kordinator bidang seni dan olahraga(2013). Pada tahun 2012 Penulis melaksanakan Praktek Umum (PU) pada CV Mitra Tani Parahyangan Cianjur, Jawa Barat. Pada tahun yang sa2013 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Lampung di Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillahillobbil ‘alamin, segala puji hanya kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan dalam setiap kehidupan, juga kepada keluarga, sahabat, dan penerus risalahnya yang mulia.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **“Hubungan Peranan Pengurus Kelompok Masyarakat (POKMAS) Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) Di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat”**, banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih, bantuan, nasehat, serta saran-saran yang membangun. Oleh karena itu, dengan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S., selaku pembimbing pertama atas bimbingan, nasihat, dukungan dan perhatian yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi.
2. Ir. Indah Nurmayasari, M.Sc., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi.

3. Dr. Ir. Dewangga Nimatullah, M.S., sebagai dosen penguji Skripsi ini atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan.
4. Dr. Ir. R Hanung Ismono., M.p., selaku pembimbing akademik atas dukungan dan sarannya selama proses perkuliahan.
5. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
6. Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.P., selaku ketua jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen Jurusan Agribisnis atas semua ilmu yang telah diberikan selama Penulis menjadi mahasiswa di Universitas Lampung.
8. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Syamsul Bahri, S.H., dan Ibunda Isnani Almawati, S.E., serta adik tercinta Selvy Nurrahmahdani.S, yang tidak pernah berhenti memberikan curahan kasih sayang, semangat dan doa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya dengan baik.
8. Fitria Meriza, S.P., yang selalu menjadi penyemangat, dan selalu memberikan motivasi serta doa, dari awal penulis menulis skripsi dan sampai selesainya skripsi ini.
9. Rekan-rekan Agribisnis 2009, rekan seperjuangan Firjen Ansoni Rafles dan Revina Mariska. Semoga kelak kita semua menjadi orang yang sukses.
10. Keluarga besar Chelsea Indonesia Supporters Club (CISC) Lampung, Setiadi Saputra, S.T., Saypul Bahri, S.Kom., M.Kadafi, S.Pd., M. Ajik, S.T., Firdaus Aunurifki, S.H., Fitriansyah Bakti, S.P., Adit Nurmansyah, atas kebersamaannya dalam suka dan duka senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan doa.

11. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Agribisnis (Mbak Ayi, Mbak Fitri, Mbak Iin, Mas Kardi, Mas Boim, Mas Bukhari) atas semua kemudahan dan bantuan yang diberikan.
12. Semua pihak yang telah membantu demi terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Akhirnya, penulis meminta maaf jika ada kesalahan dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun.

Bandar Lampung,
Penulis,

Syani Ahmad Alqautzar

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Dan Masalah	1
B. Tujuan penelitian	8
C. Kegunaan penelitian	9
 II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	
A. Tinjauan Pustaka	10
B. Kerangka Pemikiran	28
C. Hipotesis	30
 III. METODE PENELITIAN	
A. Definisi Operasional, Pengukuran, dan Klasifikasi	32
B. Lokasi, Waktu Penelitian, dan Responden	40
C. Metode Penentuan Sampel	40
D. Metode Penelitian Dan Pengumpulan Data	42
E. Metode Analisis Data	42
 IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Letak Geografis dan Luas Wilayah	45
B. Keadaan Penduduk	47

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Responden	49
B. Peranan Pengurus Kelompok Masyarakat dalam Program RSMW	52
C. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	65
D. Pengujian Hipotesis	71

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Luas Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Kecamatan 2011	4
Tabel 2. Data kampung dan jumlah penduduk Kecamatan Tumijajar ...	6
Tabel 3. Jumlah anggota masyarakat responden	42
Tabel 4. Ketinggian kampung / kelurahan dari permukaan laut dan kedalaman maksimal minimal air sumur di Kecamatan Tumijajar	46
Tabel 5. Keadaan jumlah penduduk menurut Kampung/Kelurahan di KecamatanTumijajar	47
Tabel 6. Banyaknya Sarana Pendidikan SD, SLTP, SLTA atau sederajat MenurutKampung/Kelurahan di Kecamatan Tumijajar 2009	48
Tabel 7. Keadaan kelompok masyarkat berdasarkan umur	49
Tabel 8. Sebaran anggota kelompok masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan formal	50
Tabel 9. Keadaan masyarakat berdasarkan umur	50
Tabel 10. Sebaran masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan formal .	51
Tabel 11. Sebaran skor peranan pengurus kelompok masyarakat dalam program RSMW di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	52
Tabel 12. Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan	53

Tabel 13. Ikut serta dalam menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan konsultan perencana yang ditunjuk oleh tim fasilitator kabupaten	54
Tabel 14. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan program RSMW kepada masyarakat	56
Tabel 15. Menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan Program Ragem Sai Mangi Wawai	57
Tabel 16. Rekening kolektif disiapkan bersama kepala kampung pada bank yang telah ditunjuk	58
Tabel 17. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan	59
Tabel 18. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pada program Ragemsai Mangi Wawai	61
Tabel 19. Melakukan pembukaan penerimaan dana dan penggunaan dana	62
Tabel 20. Melaporkan perkembangan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pihak kecamatan dan pihak kabupaten	63
Tabel 21. Rekapitulasi indikator-indikator peran pengurus kelompok masyarakat dalam menjalankan Program Ragem Sai Mangi Wawai di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	64
Tabel 22. Sebaran skor tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	65
Tabel 23. Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ..	66
Tabel 24. Partisipasi dalam swadaya	67
Tabel 25. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan	68
Tabel 26. Partisipasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan	69
Tabel 27. Partisipasi dalam pemanfaatan dan menikmati hasil	70

Tabel 28. Rekapitulasi indikator-indikator partisipasi masyarakat dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	71
Tabel 29. Hubungan pengurus kelompok masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur organisasi pelaksanaan Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat	23
2. Paradigma hubungan peranan pengurus kelompok masyarakat (POKMAS) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program Ragam Sai Mangi Wawai (RSMW) di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat	31

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dan Masalah

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pembangunan Daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan daerah. Otonomi mengandung arti jumlah atau besarnya tugas, kewajiban, hak dan wewenang serta tanggung jawab urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonomi untuk menjadi isi rumah tangga daerah yang di kemukakan oleh Syafrudin (1991).

Pemerintah Daerah selaku pemegang mandat penyelenggaraan otonomi di daerah memiliki kewenangan yang luas dalam upaya mewujudkan peningkatan pembangunan di daerah, yang secara proposional dan kemandiriannya terintegrasi pula dalam kerangka pembangunan nasional.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sedang melakukan pembangunan baik di bidang perekonomian, sosial, budaya, dan infrastruktur. Tujuan pembangunan di provinsi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak program yang disusun dan dijalankan yang melibatkan instansi pemerintahan, pihak swasta, dan masyarakat setempat. Salah satu program yang disusun dan dilaksanakan di provinsi ini adalah program Ragem Sai Mangi Wawai (RSMW) yang dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan otonomi daerah yang mendukung sepenuhnya perkembangan pembangunan di daerah yang tercantum pada peraturan Bupati

Tulang Bawang Barat No.06 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Program RSMW maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat membuat suatu program dan kebijakan kemandirian kampung sebagai *self community* melalui Program RSMW. Program ini dilakukan oleh, dari, dan untuk masyarakat Tulang Bawang Barat yang mana masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program kemandirian kampung dengan kapasitas yang dimilikinya baik secara individu dan kelompok dengan peningkatan produktifitas masyarakat secara nyata dalam peningkatan aset pembangunan.

Program RSMW ini memiliki tujuan pengintegrasikan program-program pemberdayaan masyarakat, pemerintah kampung, pembangunan infrastruktur kampung dan penguatan Kelompok Usaha Ekonomi Kerakyatan (KUEK) masyarakat kampung. Program ini melingkupi kegiatan pembangunan pemerintahan kampung, kegiatan pengembangan ekonomi yang berbasis keunggulan dan potensi daya lokal, seperti kegiatan dalam sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, usahakecil dan menengah, koperasi.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas wilayah 1.201km² dengan jumlah penduduk 254.546 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 79 kampung. Luas Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Kecamatan 2011

NO	Kecamatan	Ibukota	Luas (Ha)	Jumlah penduduk	Jumlah Kampung / Kelurahan
1.	Tulang Bawang Udik	Karta	23,735.05	30.294	9
2.	Tumijajar	Daya Murni	13,321.75	42.104	10
3.	Tulang Bawang Tengah	Panaragan	27,493.45	77.390	16
4.	Pagar Dewa	Pagar Dewa	9,965.00	5.187	5
5.	Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	10,981.75	22.068	9
6.	Gunung Terang	Gunung Terang	14,191.00	30.556	12
7.	Gunung Agung	Tunas Jaya	12,764.00	28.362	11
8.	Way Kenanga	Balam Jaya	7,648.00	18.585	7
Jumlah			120,100.00	254.546	79

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kecamatan Tumijajar yang menjadi lokasi penelitian dengan ibukota Daya Murni memiliki jumlah penduduk 42.104 jiwa dan memiliki 10 kampung atau kelurahan dengan luas 13.321,75 Ha.

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah pemberian dana hibah dan dukungan program Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kepada kampung pada 8 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumberdana Program RSMW dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBK, Swadaya, dan pihak ketiga yang tidak mengikat. Besaran dana Program RSMW untuk setiap kampung dengan jumlah maksimal Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) yang diberikan berdasarkan indikator jumlah aparatur kampung yang terdiri dari, Kepala Kampung, Juru Tulis, BPK, Kaur, Suku, RT dan RW. Alokasi dana ini meliputi : (1) Pembangunan / rehabilitasi insfratraktur dan fasilitas sosial serta umum untuk kegiatan masyarakat dengan alokasi dana sebesar 50%, (2)

Perencanaan dan pengawasan teknis sebesar 5%, (3) Penataan administrasi pemerintahan kampung sebesar 10% yang dilaksanakan Tim Fasilitas Kabupaten, (4) Pengembangan sentra usaha ekonomi kerakyatan dengan alokasi dana maksimum 20%, (5) Administrasi pengelolaan kegiatan 5%, (6) Pengembangan sumberdaya manusia sebesar 5%, (7) Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi sebesar 5%.

Adapun teknis pelaksanaan dana dan mekanisme pencairan dana tersebut, yaitu :

(1) Anggaran Program RSMW terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bagian keuangan dan DPA bagian tata pemerintah Setkab. Tulang Bawang Barat dan DPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) kabupaten Tulang Bawang Barat, (2) Kepala kampung mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Tulang Bawang Barat setelah proposal kegiatan kampung dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitas Kabupaten, (3) Batas waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan sampai bulan Desember 2011, (4) kegiatan yang dilaksanakan dianggap selesai setelah ada surat pernyataan telah menyelesaikan pekerjaan dari Tim Fasilitas kabupaten, (5) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Penggunaan Dana Kegiatan disampaikan kepada bagian keuangan sekretaris daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat setiap bulan. Kegiatan RSMW yang di alokasi dananya terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman kepada Petunjuk Teknis Oprasional (PTO) RSMW, pelaksana kegiatan sebagai mana dimaksud dapat bekerjasama dengan Lembaga/Perguruan Tinggi, (6) Setiap belanja barang/jasa yang bersumber dari APBD apabila sudah mencapai nilai nominal yang dikenakan pajak (PPN dan

PPH) harus dipungut pajak dan di setorkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kecamatan Tumijajar dengan Ibukota Daya Murni merupakan salah satu dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menerima Program RSMW, kecamatan ini memiliki 10 kampung atau kelurahan dengan jumlah penduduk 42.104 Jiwa. Data kampung dan jumlah penduduk Kecamatan Tumijajar dengan ibukota Daya Murni dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data kampung dan jumlah penduduk Kecamatan Tumijajar

NO	Nama Kampung / Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Gunung Menanti	2.445
2.	Margo Dadi	4.848
3.	Murni Jaya	3.920
4.	Margo Mulyo	4.290
5.	Daya Asri	4.054
6.	Daya Murni	7.796
7.	Daya Sakti	4.564
8.	Makarti	5.044
9.	Sumber Rejo	3.167
10.	Gunung Timbul	1.976
JUMLAH		42.104

Sumber : Badan Pusat Statistik Tulang Bawang Barat

Tabel 2 menunjukkan bahwa Daya Murni yang merupakan ibukota dari Kecamatan Tumijajar memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 7.796 jiwa, sedangkan Kampung Gunung Timbul merupakan kampung dengan jumlah penduduk tersedikit yaitu 1.976 jiwa.

Program RSMW yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan memiliki Tim Fasilitas kecamatan yang dilaksanakan oleh Camat setempat dan dibantu oleh

Fasilitator Manajemen dan Asisten Teknis yang ditunjuk oleh ketua Tim Fasilitas Kabupaten dengan tugas dan tanggung jawab : (1) Melakukan kordinasi dengan dinas/instansi terkait, (2) Memfasilitasi perumusan rencana kegiatan, (3) Melaksanakan perifikasi kegiatan yang menjadi sasaran Program RSMW, (4) Melakukan *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, (5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Tim Fasilitas Kabupaten, (6) membantu POKMAS dalam menyusun laporan pelaksanaan Program RSMW.

Keberhasilan Program Reagem Sai Mangi Wawai di Kecamatan Tumijajar ini tidak lepas dari peranan pengurus kelompok masyarakat yang tersebar di 10 desa/kampung yang berada di Kecamatan Tumijajar. Pengurus kelompok masyarakat ini di tuntut untuk menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan, pengurus kelompok masyarakat wajib ikut serta dalam menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan konsultan perencana yang ditunjuk oleh tim fasilitasi kabupaten, pengurs kelompok masyarakat agar menyebarluaskan dan mensosialisasikan Program RSMW ini kemasyarakat yang ada di Kecamatan Tumijajar, Pengurus kelompok masyarakat agar dapat menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan, pengurs kelompok masyarakat menyiapkan rekening kolektif bersama kepala kampung pada bank yang ditujuk, pengurus kelompok masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang telah direncanakan, pengurus kelompok masyarakat harus membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, pengurus kelompok masyarakat wajib melakukan pembukuan penerimaan dana

dan penggunaan dana, pengurus kelompok masyarakat wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada kepala kampung dan camat. Keberhasilan pada Program RSMW ini akan terlaksana dengan baik bukan hanya dilihat dari peranan pengurus kelompok masyarakatnya, jugai dibutuhkan partisipasi masyarakat. Keberhasilan Program RSMW bergantung pada besarnya peranan dan partisipasi seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Tumijajar. Tanpa adanya peranan pengurus kelompok masyarakat dan partisipasi dari masyarakat maka Program Ragem Sai Mangi Wawai ini tidak akan berhasil. Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan, penulis tertarik menelaah sampai sejauh mana peranan pengurus kelompok masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program RSMW di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dari uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Sejauh mana peranan pengurus kelompok masyarakat dalam Program RSMW di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
2. Sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam Program RSMW di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
3. Apakah ada hubungan antara peranan pengurus kelompok masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program RSMW di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

B. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tingkat peranan pengurus kelompok masyarakat dalam Program RSMW di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program RSMW di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Hubungan antara peranan pengurus kelompok masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program RSMW di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

C. Kegunaan penelitian

Penelitian ini berguna sebagai :

1. Bahan informasi bagi pemerintah daerah, khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Pertimbangan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam proses pembangunan.
3. Bahan informasi bagi pemerintah Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Sumbangan pemikiran bagi peneliti sejenis sebagai refrensi.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peranan

Menurut Sajogyo (1992), peranan adalah seluruh pola kebudayaan yang berhubungan dengan posisi atau kedudukan tertentu yang mencakup nilai dan perilaku seseorang yang diharapkan oleh masyarakat pada kedudukan tertentu. Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai pengertian peranan, maka dalam hal ini akan dikemukakan beberapa definisi peranan dari para ahli. Ciri yang ditunjukkan dengan nyata oleh individu dalam saling berinteraksi, lama kelamaan tersusun di sekeliling pola-pola interaksi umum dalam situasi yang disebut peranan sosial. Kedudukan (status) adalah kumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi dengan orang lain.

Soekanto (1990), peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu-individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Honadle dan Van Sant (1985, dalam Soetomo, 2006) sukses suatu institusi dalam suatu program pembangunan dapat dilihat dari peranannya dalam hal : (1) Memfasilitasi arus dua arah dari informasi dan pelayanan eksternal dengan aspirasi dan kepentingan lokal. (2) Mereduksi resiko sampai minimal. (3) Mengadaptasi aktivitas program sesuai kondisi lokal. (4) Mendorong kebebasan politik dan ekonomi masyarakat lokal khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan akses terhadap peluang. (5) Mengkordinasi dan menyebarkan manfaat dari program. Dengan demikian apabila institusi didalam suatu program pembangunan berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kedudukan yang dimilikinya maka akan dapat membangun kepercayaan dan memperkuat legitimasi institusi tersebut di mata masyarakat.

Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (Hadi, 2013).

2. Pengertian Kelompok Masyarakat “Pokmas”

Kelompok adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dan mengadakan hubungan antara sesama mereka (Soekanto, 1990). Menurut Gerungan (1978 dalam Mardikanto, 1991), kelompok adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua atau lebih orang-orang yang mengadakan interaksi secara intensif dan teratur, sehingga diantara mereka terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kesatuan tersebut. Iver dan Page (1961 dalam Mardikanto, 1991), mengemukakan bahwa kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi serta memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong.

Menurut Rakhmat (2000), kelompok mempunyai tujuan dan melibatkan interaksi diantara anggota-anggotanya. Dengan kata lain, kelompok memiliki dua tanda psikologis. Pertama, anggota-anggota kelompok merasa terikat dengan kelompok (*sense of belonging*) yang tidak dimiliki orang yang bukan anggota. Kedua, nasib anggota-anggota kelompok saling bergantung sehingga hasil setiap orang terkait dalam cara tertentu dengan hasil yang lain.

Pengertian masyarakat itu sendiri menurut Gitosaputro (2003) adalah sekelompok orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah geografis tertentu, dan satu sama lain saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidupnya.

Menurut Kartono (1994), kelompok adalah kumpulan yang terdiri dari 2 (dua) atau lebih individu, dan kehadiran masing-masing individu mempunyai arti serta

nilai bagi orang lain, dan ada dalam situasi mempengaruhi. Pada setiap anggota-anggota tadi selalu terdapat aksi-aksi dan reaksi-reaksi yang timbal balik.

Pada Program RSMW pengertian kelompok masyarakat adalah kumpulan beberapa orang yang bertugas dalam menyelenggarakan kegiatan Program RSMW dan bertugas menyelenggarakan seluruh kegiatan serta bertanggungjawab secara teknis dan administratif. Struktur kelompok masyarakat dalam Program RSMW terdiri dari Fasilitator masyarakat, Kepala Kampung, Ketua, bendahara, sekretaris, anggota Pokmas bidang fisik, dan anggota Pokmas bidang Usaha Ekonomi Kerakyatan (UEK).

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan dapat disimpulkan kelompok masyarakat (Pokmas) dapat diartikan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersamaan, sehingga terjadi adanya hubungan antar mereka. Dalam pelaksanaan Program RSMW pokmas memiliki tugas dan peranan, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan bertanggungjawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan konsultan perencana yang ditunjuk oleh tim fasilitasi kabupaten.
3. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan program.
4. Menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Menyiapkan rekening kolektif bersama kepala kampung pada bank yang ditunjuk.

6. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan.
7. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
8. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana.
9. Melaporkan perkembangan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada kepala kampung dan camat.

3. Partisipasi

Menurut FAO (1989), diacu dalam Matheos Nalle (2003), partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Menurut Ndraha (1990), diacu dalam Lugiarti (2004), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah meliputi; (1) partisipasi dalam / melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial, (2) partisipasi dalam memperhatikan / menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya, (3) partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan, (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional, (5) partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan.

Menurut Effendi, partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu

dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan. Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

4. Program RSMW

Program RSMW merupakan program kemandirian kampung yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Program ini tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat NO.06 Tahun 2012 tentang, Pelaksanaan Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat”. Program RSMW adalah program unggulan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengintegrasikan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan pemerintah serta masyarakat kampung yang dilatar belakangi prinsip “Kebersamaan untuk Keberhasilan”. Program ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program kemandirian kampung dengan kapasitas yang dimilikinya baik secara individu dan kelompok dengan peningkatan produktifitas secara nyata dalam peningkatan asset pembangunan.

a. Tujuan Program RSMW

Tujuan Program RSMW ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mengintegrasikan program-program pemberdayaan masyarakat, pemerintah kampung, pembangunan infrastruktur kampung dan penguatan Kelompok Usaha Ekonomi Kerakyatan masyarakat kampung dalam rangka efektifitas efisiensi *monitoring*, evaluasi, dan pengawasan program.
- 2) Mensinergikan seluruh upaya pembangunan kampung dalam aspek lembaga pemerintahan kampung, ekonomi, sosial budaya serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki dari masyarakat selaku target dan pelaku pembangunan, sehingga dapat menjamin keberhasilan dan kontinuitas program.
- 4) Akselerasi peningkatan perekonomian kampung, karena program akan ditekankan pada sektor yang memiliki keunggulan lokal sesuai potensi sumberdaya dikampung yang memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) pada perekonomian setempat.
- 5) Memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan kampung, yang penting artinya sebagai modal sosial (*Sosial Capital*) dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

b. Prinsip Dasar Program RSMW

Adapun prinsip dasar dari Program RSMW ini adalah :

1. Bertumpu pada pembangunan manusia, program pelaksanaan RSMW senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya
2. Berorientasi pada masyarakat miskin, semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
3. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
4. Kesenjangan dan keadilan *gender*, laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
5. Demokratis, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
6. Transparansi dan *akuntable*, masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
7. Prioritas pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber yang terbatas.

8. Kolaborasi, semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antara pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Berkelanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
10. Sederhana, semua aturan, mekanisme, dan prosedur dalam pelaksanaan Program RSMW harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

c. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan melalui Program RSMW ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan pemerintahan kampung yang meliputi; penyempurnaan papan data monografi, penertiban administrasi kampung, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kampung.
2. Kegiatan pengembangan ekonomi yang berbasis keunggulan dan potensi sumberdaya lokal, misalnya kegiatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, usaha kecil dan menengah, koperasi dan lain-lain.
3. Kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat.
4. Alokasi Dana Kampung (ADK) .
5. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Kampung (TPAPK).

d. Kebijakan Pengelolaan RSMW

Kebijakan pengelolaan Program RSMW, yaitu sebagai berikut.

- 1) Metode Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan pemberian dana hibah dan dukungan program SKPD kepada kampung pada 8 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 2) Kriteria pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah
Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberian stimulan pembangunan kampung, yaitu inisiatif, partisipatif, demokratis, manfaat, gotong royong dan berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- 3) Perencanaan Kegiatan
Perencanaan Program RSMW dilakukan di setiap kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
 - b. Tergalinya potensi usaha dan sumber produksi yang dapat dikembangkan.
 - c. Tumbuhnya kelompok usaha bersama.
 - d. Tumbuhnya potensi sarana pemasaran.
 - e. Kuatnya kelembagaan pemerintahan kampung.

e. Pelaksanaan Program RSMW

Pelaksana Program RSMW adalah kelompok masyarakat (Pokmas) yang dibentuk berdasarkan musyawarah desa. Pokmas sebagaimana tersebut diatas ditetapkan oleh Kepala Kampung terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara dan anggota (2

Orang). Proposal kegiatan kampung disusun oleh Pokmas bersama-sama dengan konsultan perencana yang ditunjuk oleh tim fasilitasi kabupaten atas persetujuan kepala kampung dan diketahui oleh camat. Camat menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui tim fasilitasi kabupaten dalam bentuk rekomendasi proposal kegiatan. Mekanisme pencairan dana dilakukan melalui rekening bersama Pokmas dan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan kegiatan dalam Program RSMW yaitu sebagai berikut.

1) Perencanaan Kegiatan Fisik

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Program RSMW karena keterbatasan SDM dikampung perlu dilakukan perencanaan oleh tenaga ahli yang berfungsi sebagai konsultan perencana yang ditunjuk oleh tim fasilitasi kabupaten untuk menyusun perencanaan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing kampung.

2) Perencanaan Kegiatan Non-Fisik

Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan nonfisik melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya, terutama mengenai hal yang menjadi prioritas dan kebutuhan di kampung masing-masing melalui mekanisme penyaluran penjangkaran aspirasi masyarakat. Dalam hal-hal tertentu untuk efektifitas dan ketepatan sasaran pelaksanaannya dapat dikoordinasikan oleh tim fasilitasi kabupaten dan tim fasilitasi kecamatan.

Adapun prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah Program RSMW adalah sebagai berikut.

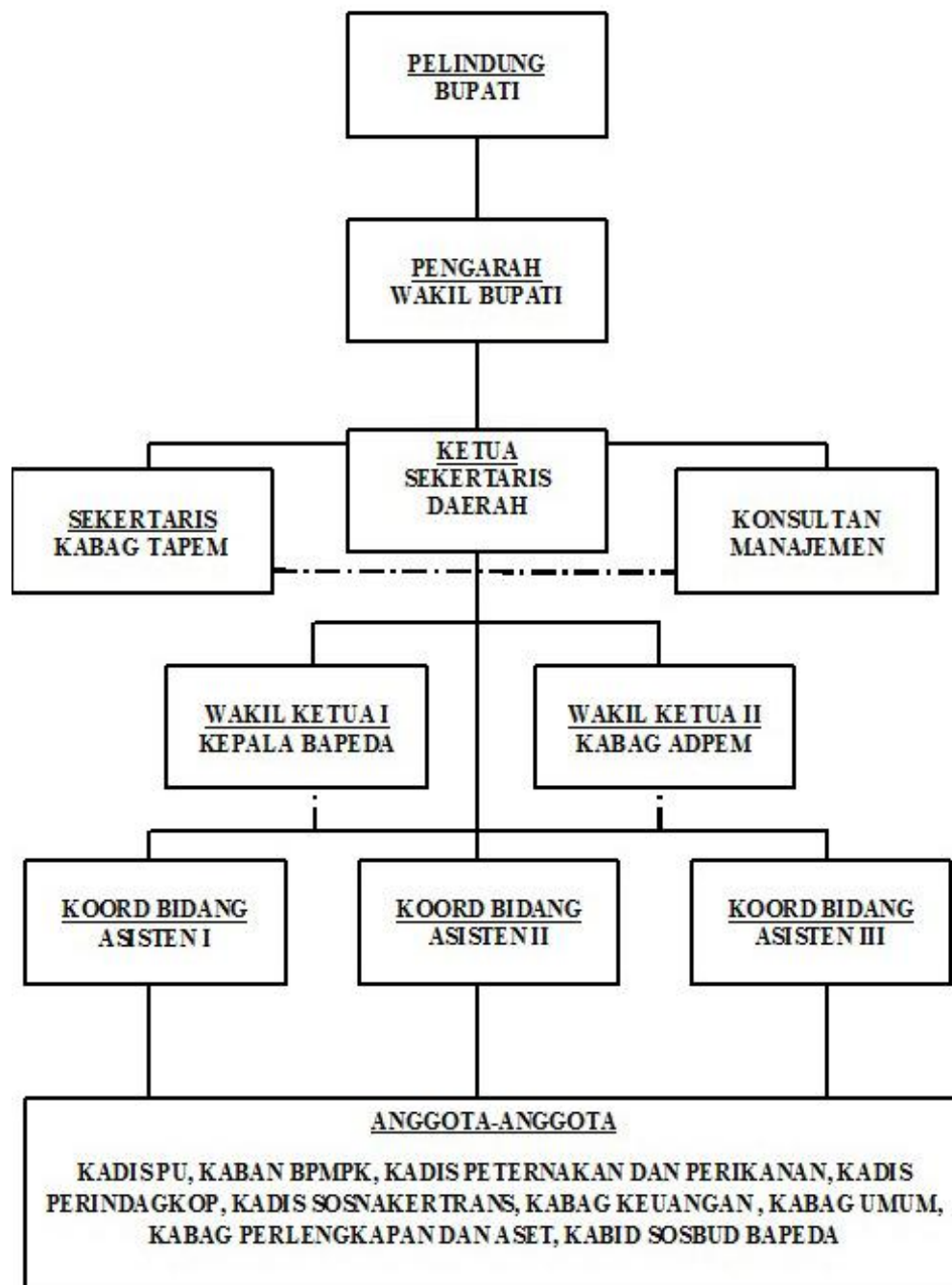
- a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bersama (kooperatif) yaitu oleh aparat pemerintah kampung bersama dengan masyarakat kampung/kelompok masyarakat dengan sumberdaya, tata cara, dan teknologi tepat guna spesifik lokasi.
- b. Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*) baik secara moral, teknis maupun administrasi.
- c. Peran partisipatif masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat dapat berupa bahan-bahan material, dana, dan tenaga kerja.

f. Organisasi Pelaksanaan Program Ragem Sai Mangi Wawai Kabupaten Tulang Bawang Barat

- a) Tingkat Kabupaten
 - 1. Bupati Tulang Bawang Barat sebagai pelindung Program RSMW.
 - 2. Wakil Bupati Tulang Bawang Barat sebagai pengarah Program RSMW.
 - 3. Sekertaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai ketua tim fasilitas Program RSMW.
 - 4. Kepala Bappeda Tulang Bawang Barat sebagai Wakil ketua I Tim Fasilitas Program RSMW.
 - 5. Kepala bagian administrasi pembangunan Setdakab Tulang Bawang Barat sebagai wakil ketua II tim fasilitator Program RSMW.
 - 6. Asisten bidang pemerintahan dan Kesra selaku kordinator bidang I (pemberdayaan aparatur, penataan administrasi pemerintah, pengembangan SDM, dan kesra Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat).

7. Asisten bidang II (perekonomian dan pembangunan selaku kordinator bidang pemberdayaan ekonomi rakyat dan pembangunan infrastruktur Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Asisten bidang III (administrasi umum sebagai kordinator bidang penatausahaan keuangan, *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Kepala bagian tatapemerintah Setdakab Tulang Bawang Barat sebagai sekertaris tim fasilitas kabupaten Program RSMW kabupaten Tulang Bawang Barat. Dinas/instansi terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, BPMPD, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Umum, Bagian Perlengkapan, Bagian Hukum dan Bagian Keuangan Setdakab Tulang Bawang Barat serta bidang Sosbud BAPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai anggota Program RSMWKabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Konsultan manajemen sebagai pendamping manajemen dan teknis pelaksanaan Program RSMW yang bertanggungjawab kepada ketua tim fasilitas Kabupaten.

Secara sistematis dari uraian organisasi pelaksanaan Program RSMW kabupaten Tulang Bawang Barat pada tingkat kabupaten, dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi pelaksanaan Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat

b) Tingkat Kecamatan

Tim Fasilitas Kecamatan dilaksanakan oleh camat setempat dan dibantu oleh Fasilitator Manajemen dan Asisten Teknis yang ditunjuk oleh ketua Tim Fasilitas Kabupaten dengan tugas dan tanggungjawab :

1. Melakukan Kordinasi dengan dinas/instansi terkait tingkat kabupaten dalam melaksanakan kegiatan Program RSMW Kabupaten Tulang Bawang Barat,
2. Memfasilitasi perumusan rencana kegiatan yang dilaksanakan,
3. Melakukan verifikasi kegiatan yang menjadi sasaran Program RSMWKabupaten Tulang Bawang Barat,
4. Melakukan *Monitoring*, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan,
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui tim fasilitasi kabupaten,
6. Membantu POKMAS dalam menyusun laporan pelaksanaan Program RSMW.

g. Pendanaan

Sumber dana Program RSMW yaitu berasal dari: APBD Kabupaten, APBK, Swadaya Pihak ketiga yang tidak mengikat. Besaran danaProgram RSMW dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Baratuntuk setiap kampung dengan jumlah maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan berdasarkan indikator jumlah aparatur kampung (kepala kampung, juru tulis, BPK, kaur, suku, RT dan RW).

h. Jenis Kegiatan dan Alokasi Pendanaan

Pada dasarnya jenis kegiatan yang diajukan masyarakat terbuka untuk kegiatan yang menurut masyarakat menjadi skala prioritas untuk pelaksanaan dikampungnya. Jenis kegiatan lebih ditujukan untuk membangun SDM aparatur dan masyarakat, pembangunan infrastruktur kampung, rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasarana kantor serta fasilitas sosial-umum yang rusak ringan atau berat dengan pola kegiatan padat karya dengan kategori dan alokasi pendanaan meliputi:

1. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas sosial serta umum untuk kegiatan prasarana dasar masyarakat dengan alokasi dana sebesar 50 persen dari alokasi perkampung.
2. Perencanaan dan pengawasan teknis sebesar 5 persen penataan administrasi pemerintah kampung sebesar 10 persen yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi kabupaten.
3. Pengembangan sentra usaha ekonomi kerakyatan dengan alokasi maksimum 20 persen dari alokasi dana perkampung, dana tersebut bersifat bergulir dan berkelanjutan.

Bahwa untuk mengefektifkan pemanfaatan anggaran tersebut pelaksanaannya adalah untuk pemberdayaan kelompok usaha ekonomi kerakyatan melalui pengembangan peternakan kambing etawa yang dilaksanakan bergulir untuk 1 tahun anggaran dipusatkan di 1 (satu) kampung dalam 1(satu) kecamatan, hal tersebut agar secara ekonomis dapat mempercepat perkembangan sentra usaha ekonomi kerakyatan tersebut, masing-masing kampung memiliki modal usaha

yang besarnya sesuai dengan nilai nominal alokasi dana untuk pengembangan sentra usaha ekonomi kerakyatan di tiap-tiap kampung.

Administrasi pengelolaan kegiatan maksimal 5 persen pengembangan sumberdaya manusia sebesar 5 persen, yaitu melalui pelaksanaan bimbingan teknis bagi aparatur kampung/masyarakat yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi kabupaten.

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim *monitoring* dan evaluasi sebesar 5 persen yang penggunaannya sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan rapat koordinasi *monitoring* dan evaluasi RSMW, sosialisasi dan pelaksanaan *monitoring* Program RSMW.
- b. Honorarium dan transportasi tim.
- c. Honorarium tim Pembina Kabupaten.

Pengelolaan administrasi serta pelaporan yang dilaksanakan oleh konsultan perencanaan, pelaporan dimaksud diserahkan kepada ketua tim fasilitasi kabupaten melalui bagian administrasi pembangunan serta bagian keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Penelitian Terdahulu

Menurut Wijaya (2011) meneliti tentang hubungan antara peranan peratin (Tokoh masyarakat/Kepala desa) dengan tingkat kinerja Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peranan peratin dalam program GMBR di Kabupaten Lampung Barat dalam kategori tinggi sebesar 80 persen. Hal ini karena sebagian besar peratin sudah melaksanakan perannya

dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam Program GMBR. Peratin selalu melakukan sosialisasi program kepada seluruh lapisan masyarakat, memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan, membentuk pokmas, menginventarisasi swadaya masyarakat, pendampingan pokmas, memimpin forum musyawarah, memantau dan evaluasi serta pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dari awal proses pembangunan hingga selesai program pembangunan.

Tingkat kinerja pokmas dalam Program GMBR di Kabupaten Lampung Barat dalam kategori tinggi sebesar 70 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pokmas sudah cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Program GMBR namun belum dapat tercapai secara maksimal. Terdapat hubungan yang signifikan antara peranan peratin/kepala pekon dengan tingkat kinerja pokmas dalam Program GMBR ($r_s=0,467$) yang ditunjukkan oleh nilai t-hitung 3,384 lebih besar dari t-tabel pada $\alpha = 0,05$ dan $\alpha = 0,01$, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik peranan peratin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam program GMBR maka semakin tinggi tingkat kinerja pokmas sebagai pelaksana kegiatan dalam Program GMBR.

Menurut Kusumawati (2011), meneliti tentang hubungan antara tingkat peranan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di Kabupaten Lampung Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat peranan pokmas dalam Program GMBR di Kabupaten Lampung Barat dalam kategori tinggi sebesar 75 persen, ini berarti kelompok masyarakat telah memahami dan menghayati tugas

pokok dan fungsinya dalam Program GMBR. Pokmas selalu melakukan bimbingan berupa arahan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan sarana fisik, mengikuti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dari pembangunan tahap satu sampai kegiatan pembangunan selesai serta menghimpun potensi swadaya masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat ikut serta dalam merencanakan pembangunan dan ikut dalam pengambilan keputusan, ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana fisik, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menerima dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat peranan pokmas dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program GMBR ($r_s=0,660$). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi peranan pokmas dalam memahami tugas pokok dan fungsinya dalam program GMBR maka masyarakat akan terpacu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berpartisipasi secara aktif dalam program GMBR.

B. Kerangka Pemikiran

Program Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip-prinsip otonomi yang diwujudkan dengan memberikan kewewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi daerah .

Salah satu wujud dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan daerah, terutama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dalam bentuk partisipasi

masyarakat. Wujud partisipasi masyarakat dibentuk dalam suatu wadah organisasi yang disebut dengan Kelompok Masyarakat (POKMAS), yang merupakan pelaksana kegiatan pembangunan di tingkat desa dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam suatu program pembangunan.

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu kabupaten yang mengadakan suatu program pembangunan daerah yaitu Program RSMW, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh peranan masyarakat sebagai pelaksana.

Peranan adalah suatu kedudukan seseorang yang dapat menggambarkan hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas-tugasnya. Peranan kelompok masyarakat dalam Program RSMW dapat diukur dari peran serta secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan, keikutsertaan dalam menyusun proposal dan rencana teknis, berperan serta dalam menyebarluaskan dan menyosialisasikan program, menghimpun potensi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, persiapan rekening kolektif bersama kepala kampung pada bank yang ditunjuk, berperan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan, membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RSMW, melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana, berperan dalam melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana. Peranan kelompok masyarakat ini dapat berjalan secara maksimal apabila masyarakat ikut berpartisipasi.

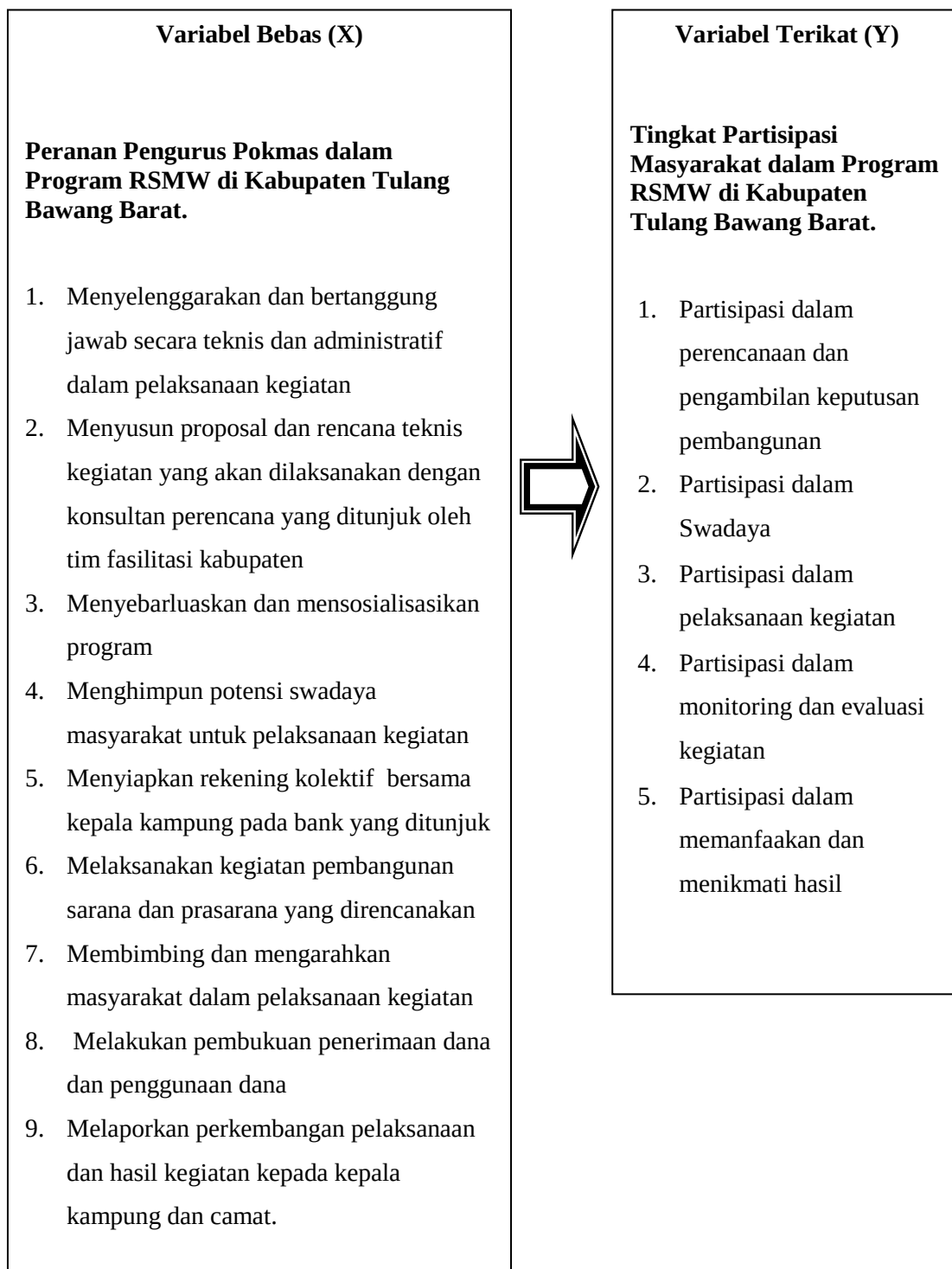
Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam Program RSMW dapat dinilai melalui keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan pembangunan, dan keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan, berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan, serta berpartisipasi dalam pemanfaatan dan menikmati hasil.

Tingkat peranan Pokmas yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini adalah tugas dari Pokmas yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Indikator tingkat peranan Pokmas dalam Program RSMW tersebut dijadikan variabel bebas (X) dalam penelitian ini, sedangkan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada Program RSMW ini menjadi variabel terikat (Y).

Secara sistematis kerangka pemikiran hubungan antara peranan Pokmas dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program RSMW dapat dilihat pada Gambar2.

C. Hipotesis

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara tingkat peranan pengurus kelompok masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program RSMW di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.



Gambar 2. Paradigma hubungan peranan pengurus kelompok masyarakat (POKMAS) dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam program Ragam Sai Mangi Wawai (RSMW) di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

III. METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional, Pengukuran, dan Klasifikasi

Definisi operasional pada penelitian ini mencakup semua aspek penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis dan diuji sesuai dengan tujuan penelitian. Program RSMW ini merupakan suatu program pembangunan daerah. Dalam penelitian ini peubah atau variabel bebas (X) digunakan untuk peranan kelompok masyarakat. Peranan adalah suatu kedudukan seseorang yang dapat menggambarkan hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas-tugasnya. Indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada Program RSMW ini menjadi variabel terikat (Y). Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan

1. Peranan Pengurus Kelompok Masyarakat (Variabel X)

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut menjalankan suatu peranan (Soekanto 1990). Tingkat peranan Pengurus Pokmas dalam Program RSMW memiliki 9 indikator. Indikator-indikator peranan Pokmas dalam Program RSMW akan diukur menggunakan daftar pertanyaan yang jawabannya diklasifikasikan dalam kategori sangat tinggi, tinggi,

sedang, rendah, dan sangat rendah diberi skor 1,2,3, 4, dan 5. Pemberian skor tersebut berdasarkan pada pemberian skor skala likert (Nazir, 1988 dalam Sambas, 2007). Angka-angka inilah yang nantinya diolah sehingga menghasilkan skor tertentu. Namun perlu diingat, sesuai dengan sifat ataupun cirinya angka-angka atau skor yang sudah diperoleh tidak menunjukkan arti apa-apa atau tidak menunjukkan bahwa skor yang tinggi lebih baik dari skor yang rendah. Angka “5” hanya menunjukkan tingkat peranan “sangat tinggi”, angka 4 menunjukkan “tinggi”, angka “3” menunjukkan tingkat peranan “cukup”, angka “2” menunjukkan tingkat peranan “rendah”, dan angka 1 menunjukkan tingkat peranan “sangat rendah”. Pengklasifikasian kelas ini dilakukan dengan data ordinal dan di transformasikan menjadi data interval, karena data ordinal tidak dapat diolah secara aritmatika, sehingga data tersebut diolah menggunakan *Method of Succesive Interfal* (MSI). Pertanyaan yang diajukan berjumlah 31 pertanyaan dan di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah (60,96 – 71,12), rendah (71,13 – 81,29), sedang (81,30 – 91,46), tinggi (91,47 – 101,63), dan sangat tinggi (101,64 – 111,76).

Indikator-indikator yang diajukan dalam pengukuran dan klasifikasi peranan pengurus kelompok masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Penyelenggaraan dan pertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan yaitu semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis maupun administratif. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1 sampai 5 berdasarkan data lapangan. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 4 pertanyaan. Skor di klasifikasikan

dalam kelas sangat rendah (7,62 – 9,40), rendah (9,41 – 11,19), sedang (11,20 – 12,98), tinggi (12,99 – 14,77), dan sangat tinggi (14,78 – 16,53).

- b. Pengikutsertaan menyusun proposal dan perencanaan teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan konsultan perencanaan yang ditunjuk oleh tim fasilitasi kabupaten yaitu tugas Pokmas ikut serta dalam mengatur secara baik proposal dan rencana anggaran dan biaya kegiatan yang akan dilaksanakan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1 sampai 5. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 4 pertanyaan. Skor di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah (6,43 – 7,96), rendah (7,97 – 9,50), sedang (9,51 – 11,04), tinggi (11,05 – 12,58), dan sangat tinggi (12,59 – 14,10).
- c. Penyebarluaskan dan pensosialisasikan program yaitu tugas Pokmas untuk menyebarluaskan program agar masyarakat mengetahui dan ikut berpartisipasi di dalam program. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1 sampai 5. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 4 pertanyaan. Skor di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah (6,01 – 7,70), rendah (7,71 – 9,40), sedang (9,41 – 11,10), tinggi (11,11 – 12,80), dan sangat tinggi (12,81 – 14,50).
- d. Penghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan yaitu tugas Pokmas dalam mengumpulkan dan mendata banyaknya sumbangan masyarakat yang diberikan baik dalam bentuk tenaga kerja, lahan, material dan lain-lain. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1 sampai 5. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 3 pertanyaan. Skor di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah

(5,91 – 7,34), rendah (7,35 – 8,78), sedang (8,79 – 10,22), tinggi (10,23 – 11,66), dan sangat tinggi (11,67 – 13,09).

- e. Penyiapan rekening kolektif bersama kepala kampung pada bank yang ditunjuk yaitu tugas spesimen ketua dan bendahara Pokmas dalam pembuatan rekening kolektif masyarakat. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1 sampai 5. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 3 pertanyaan. Skor di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah (6,12 – 7,48), rendah (7,49 – 8,85), sedang (8,86 – 10,22), tinggi (10,23 – 11,59), dan sangat tinggi (11,60 – 12,92).
- f. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan yaitu tugas pokmas dalam kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan dan keserasian pengembangan wilayah serta membuka wilayah terisolir. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1 sampai 5. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 4 pertanyaan. Skor di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah (6,01 – 7,89), rendah (7,90 – 9,78), sedang (9,79 – 11,67), tinggi (11,68 – 13,56), dan sangat tinggi (13,57 – 15,40).
- g. Bimbingan dan arahan pada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yaitu tugas Pokmas dalam memberi petunjuk kepada masyarakat pada pelaksanaan kegiatan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1 sampai 5. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 3 pertanyaan. Skor di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah (3,83 – 5,34), rendah (5,35 – 6,87), sedang (6,88 – 8,40), tinggi (8,41 – 9,93), dan sangat tinggi (9,94 – 11,418).

- h. Pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana yaitu tugas Pokmas dalam membuat pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja, pembelian bahan material, dan lainnya. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1 sampai 5. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 3 pertanyaan. Skor di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah (3,00 – 4,21), rendah (4,22 – 5,43), sedang (5,44 – 6,65), tinggi (6,66 – 7,87), dan sangat tinggi (7,87 – 9,082).
- i. Pelaporan perkembangan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada kepala kampung dan camat yaitu tugas Pokmas dalam membuat pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Program RSMW. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 3 pertanyaan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1 sampai 5. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 3 pertanyaan. Skor di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah (6,12 – 7,60), rendah (7,61 – 9,09), sedang (9,10 – 10,58), tinggi (10,59 – 12,07), dan sangat tinggi (12,08 – 13,54).

2. Partisipasi Masyarakat (Variabel Y)

Menurut Effendi, partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan. Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota/kelompok masyarakat

berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan dan ikut memanfaatkan hasil pembangunan.

Pengukuran partisipasi masyarakat (variabel Y) dalam Program RSMW ini dengan menggunakan pertanyaan yang diberi skor yaitu angka “5” hanya menunjukkan tingkat partisipasi “sangat tinggi”, angka 4 menunjukkan tingkat partisipasi “tinggi”, angka “3” menunjukkan tingkat partisipasi “cukup”, angka “2” menunjukkan tingkat partisipasi “rendah”, dan angka “1” menunjukkan tingkat partisipasi “sangat rendah”. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 23 pertanyaan dan di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah (44,61 – 51,92), rendah (51,93 – 59,24), sedang (59,25 – 66,56), tinggi (66,57 – 73,88), dan sangat tinggi (73,89 – 81,19). Pengklasifikasian kelas ini dilakukan dengan data ordinal dan di trnasformasikan menjadi data interval, dikarenakan data ordinal tidak dapat diolah secara aritmatika, sehingga data tersebut diolah menggunakan *Method of Succesive Interfal* (MSI).

Indikator-indikator yang diajukan dalam pengukuran dan klasifikasi tingkat partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan yaitu partisipasi yang tahapannya paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap ini, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup gagasan, tujuan, maksud dan target, diskusi. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1 sampai 5. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 4 pertanyaan. Skor di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah (6,29 – 8,74), rendah (8,75 – 11,20), sedang (11,21 – 13,66), tinggi (13,67 – 16,12), dan sangat tinggi (16,13 – 18,55).
- b. Partisipasi dalam swadaya yaitu keterlibatan masyarakat dalam memikul beban pembangunan seperti memberikan sumbangan materi. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1 sampai 5. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 4 pertanyaan. Skor di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah (4,00 – 5,39), rendah (5,40 – 6,79), sedang (6,80 – 8,19), tinggi (8,20 – 9,59), dan sangat tinggi (9,60 – 10,95).
- c. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu keterlibatan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas riil yang merupakan perwujudan program dalam kegiatan fisik bentuk tenaga kerja yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1 sampai 5. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 5 pertanyaan. Skor di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah (9,88 – 12,02), rendah (12,03 – 14,17), sedang (14,18 – 16,32), tinggi (16,33 – 18,47), dan sangat tinggi (18,48 – 20,61).

- d. Partisipasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengukur atau memberikan penilaian sampai seberapa jauh tujuan program dapat dicapai, penilaian terhadap organisasi tingkat kampung dalam Program RSMW, dan penilaian terhadap bidang pembangunan misalnya fasilitas umum dan lainnya. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1 sampai 5. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 5 pertanyaan. Skor di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah (9,16 – 11,56), rendah (11,57 – 13,97), sedang (13,98 – 16,38), tinggi (16,39 – 18,79), dan sangat tinggi (18,80 – 21,16).
- e. Partisipasi dalam pemanfaatan dan menikmati hasil yaitu keterlibatan warga masyarakat dalam menerima hasil, menikmati keuntungan atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun secara langsung dari kegiatan yang telah dilakukan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan daftar pertanyaan yang diberi skor 1 sampai 5. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 5 pertanyaan. Skor di klasifikasikan dalam kelas sangat rendah (5,00 – 8,02), rendah (8,03 – 11,05), sedang (11,06 – 14,08), tinggi (14,09 – 17,11), dan sangat tinggi (17,12 – 20,09).

Klasifikasi data lapangan dirumuskan berdasarkan pada rumus Sturges (Dajan, 1986) dengan rumus :

$$Z = \frac{X - Y}{K}$$

Keterangan :

Z = interval kelas

X = nilai tertinggi

Y = nilai terendah

K = banyaknya kelas atau kategori

B. Lokasi, Waktu Penelitian, dan Responden

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah yang terdapat Program RSMW. Selain itu Kecamatan Tumijajar merupakan kecamatan dengan jarak terdekat dari ibu kota Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pengambilan data ini dilakukan pada bulan september 2014.

C. Metode Penentuan Sampel

Responden dalam penelitian ini adalah pengurus kelompok masyarakat yang berjumlah 5 orang dari setiap kampung/kelurahan dan masyarakat yang ikut dalam Program RSMW di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam penelitian ini dihitung peranannya. Kecamatan Tumijajar berjumlah 10 Kampung/kelurahan yg semua kelompok masyarakatnya dijadikan responden yang diambil menggunakan teknik sampling dalam penelitian ini dihitung partisipasinya. Jumlah populasi masyarakat di kesepuluh kampung tersebut berjumlah 42.104orang.

Perhitungan jumlah sampel anggota masyarakat mengacu pada teori Yamane (1967 dalam Rakhmat, 2001), yaitu :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel.

N = Jumlah populasi.

d = Presisi (diterapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%).

$$n = \frac{42.104}{42.104(0,1)^2 + 1} = 100$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang akan diambil dari 10 kampung yang berada di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pengambilan sampel masing-masing kampung ditentukan menggunakan *proportional random sampling* yang mengacu pada Nazir (1988), yaitu :

$$ni = \left[\frac{Ni}{N} \right] n$$

Keterangan:

- ni = Jumlah sampel setiap kampung.
- Ni = Jumlah populasi masing-masing kampung.
- N = Jumlah seluruh populasi anggota masyarakat.
- n = Jumlah sampel secara keseluruhan.

Tabel 3. Jumlah anggota masyarakat responden

NO	Nama Kampung / Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Sample
1.	Gunung Menanti	2.445	6
2.	Margo Dadi	4.848	12
3.	Murni Jaya	3.920	9
4.	Margo Mulyo	4.290	10
5.	Daya Asri	4.054	10
6.	Daya Murni	7.796	18
7.	Daya Sakti	4.564	11
8.	Makarti	5.044	12
9.	Sumber Rejo	3.167	7
10.	Gunung Timbul	1.976	5
JUMLAH		42.104	100

D. Metode Penelitian Dan Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan kelompok masyarakat yang termasuk dalam Program RSMW dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder diperlukan sebagai tambahan informasi yang diperoleh dari literatur, dinas atau instansi terkait dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif (tabulasi) untuk menganalisis peranan kelompok masyarakat, menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan menganalisis hubungan antara peranan kelompok masyarakat dengan hubungan tingkat partisipasi masyarakat.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik non parametrik uji korelasi *Rank Spearman*.

Adapun rumus uji koefisien korelasi Rank Spearman (Siegel, 1994) adalah sebagai berikut.

$$rs = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n di^2}{n^3}$$

Keterangan :

- rs = Penduga koefisien korelasi.
- di = Perbedaan setiap pasangan rank .
- N = Jumlah responden.

IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Ibukota Panaragan Jaya adalah salah satu dari 15 kota/kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung yang diresmikan pada tanggal 26 November 2008.

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas wilayah 1.201km² dengan jumlah penduduk 254.546 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan 79 kampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat berada pada titik kordinat 104,054° - 105,018° BT dan 402,0° - 404,6° LS. Batas-batas administratif Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Kecamatan Way Serdang serta Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Abung Surakarta dan Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Bandar Agung, Menggala, Kabupaten Tulang Bawang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Batin, Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan

Kecamatan Tumijajar dengan Ibukota Daya Murni merupakan salah satu dari 8 (delapan) kecamatan yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki jumlah penduduk 42.104 jiwa dan memiliki 10 kampung atau kelurahan dengan luas 13.321,75 hektar.

Secara Geografis Kecamatan Tumijajar yang merupakan bagian dari Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan batas wilayah :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tulang Bawang Tengah
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tulang Bawang Udik

Tabel 4. Ketinggian kampung / kelurahan dari permukaan laut dan kedalaman maksimal minimal air sumur di Kecamatan Tumijajar

Nama Kampung / Kelurahan	Ketinggian Dari Permukaan Laut (m)	Kedalaman Air Sumur (m)	
		Minimal	Maksimal
Gunung Menanti	27	13	15
Margo Dadi	24	5	7
Murnijaya	30	5	15
Margo Mulyo	24	5	12
Daya Asri	20	4	8
Daya Murni	20	6	10
Daya Sakti	29	6	10
Makarti	25	8	11
Sumber Rejo	25	11	15
Gunung Timbul	29	12	15

Sumber Data: Tumijajar dalam Angka 2010

B. Keadaan Penduduk

1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil registrasi penduduk di tiap-tiap kampung/kelurahan, jumlah rumah tangga di Kecamatan Tumijajar sebesar 14.010 dan jumlah penduduknya sebesar 41.419 jiwa dengan luas wilayah sebesar 13.869,75 hektar berarti kepadatan penduduknya mencapai 212 jiwa/km².

Tabel 5. Keadaan jumlah penduduk menurut Kampung/Kelurahan di Kecamatan Tumijajar

Nama Kampung/Kelurahan	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah laki-laki + Perempuan
Gunung Menanti	1.890	1.172	3.062
Margo Dadi	2.488	2.321	4.809
Murni Jaya	1.921	1.801	3.722
Margo Mulyo	2.180	2.047	4.227
Daya Asri	2.036	1.994	4.030
Daya Murni	3.570	3.415	6.985
Daya Sakti	2.595	2.399	4.994
Makarti	2.262	2.350	4.612
Sumber Rejo	1.601	1.535	3.136
Gunung Timbul	926	916	1.842
Jumlah	21.469	19.950	41.419

Sumber Data: Tumijajar Dalam Angka 2010

Tabel 5 menunjukkan Kecamatan Tumijajar memiliki jumlah masyarakat 41.419 Jiwa dimana jumlah masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 21.469 Jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan 19.950 Jiwa. Gunung Timbul adalah kampung/kelurahan dengan jumlah penduduk tersedikit dibandingkan dengan kampung/kelurahan yang lain dengan jumlah penduduk 1.842 Jiwa, laki-laki 926 Jiwa dan perempuan 916 Jiwa, Kampung/Kelurahan Daya Murni memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kampung/kelurahan yang

ada di Kecamatan Tumijajar, yaitu sebesar 6.985 Jiwa dengan jumlah Laki-laki 3.570 Jiwa dan Perempuan 3.415 Jiwa.

2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pendukung kegiatan-kegiatan yang berada di suatu tempat. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan hal utama untuk terselenggaranya suatu proses. Secara rinci sarana pendidikan dapat dilihat pada Tabel. 6.

Tabel 6. Banyaknya Sarana Pendidikan SD, SLTP, SLTA atau sederajat Menurut Kampung/Kelurahan di Kecamatan Tumijajar 2009

Nama Kampung/Kelurahan	SD (Sederajat)	SLTP (Sederajat)	SLTA (Sederajat)
Gunung Menanti	1	-	-
Margo Dadi	4	2	-
Murni Jaya	3	3	1
Margo Mulyo	3	-	1
Daya Asri	2	-	2
Daya Murni	5	3	3
Daya Sakti	3	2	1
Makarti	3	-	-
Sumber Rejo	2	-	-
Gunung Timbul	1	-	-
Jumlah	27	10	8

Tabel 6 menunjukkan sarana pendidikan SLTA sejumlah 8 sekolah, SLTP 10 Sekolah, dan SD memiliki jumlah yang paling banyak di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu 27, Kampung Daya Murni memiliki jumlah SD terbanyak yaitu terdapat 5 SD, 3 SLTP, dan 3 SLTA.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Peranan kelompok masyarakat dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk dalam klasifikasi “sedang”.
- 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam klasifikasi “sedang”.
- 3) Terdapat hubungan antara peranan pengurus kelompok masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Ragem Sai Mangi Wawai di Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan nilai koefisiensi korelasi *rank Spearman* (r_s) sebesar 0,867 dengan tingkat signifikansi 0,001 Nilai ini kurang dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara peranan pengurus kelompok masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi peranan pengurus kelompok masyarakat maka akan semakin tinggi partisipasi masyarakat.

B. Saran

- 1) Peranan kelompok masyarakat dalam menjalankan Program Ragem Sai Mangi Wawai di Kecamatan Tumjajar Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah berperan dengan cukup baik namun belum mencapai hasil yang maksimal, untuk itu pengurus kelompok masyarakat agar dapat lebih berperan dalam menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan, agar tingkat partisipasi masyarakat dalam swadaya menjadi lebih baik.
- 2) Peranan kelompok masyarakat dalam menyusun proposal dan rencana teknis, serta melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana sudah berperan dengan baik, namun masih adanya kekeliruan dan kebingungan dilapangan, dengan hal ini mungkin pemerintah setempat seperti pemerintah Kecamatan Tumijajar ataupun Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar diadakannya pelatihan-pelatihan untuk kelompok masyarakat terutama dalam hal kegiatan teknis maupun administratif guna meningkatkan kualitas peranan kelompok masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat. 2011. *Tulang Bawang Barat Dalam Angka*. BPS Tulang Bawang Barat.
- Batubara, RH, I Effendi, RT Prayitno. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Gerakan Serentak Membangun Kampung (Gsmk) Di Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*. 4(1).
- Dajan, A. 1996. *Pengantar Metode Statistik Jilid II*. LP3ES. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1994/1995. *Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta.
- Effendi, I. 2005. *Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Gitosaputra, S. 2003. *Pengantar Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Hadi, A. R. 2013. “Peranan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Partisipasi Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus”. *JIIA*, Vol.1, No. 1, Januari 2013.
- Hari Wijaya, S. 2011. Hubungan Antara Peranan Peratin Dengan Tingkat Kinerja Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (Gmbr) Di Kabupaten Lampung Barat. (Skripsi). Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Universitas Lampung.
- Kartono, K. 1994. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Kusumawati, R. 2011. *Hubungan Antara Tingkat Peranan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) di Kabupaten Lampung Barat*. Skripsi. Universitas Lampung.

- Lugiarti, Eppy. 2004. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti. Tesis. Pascasarjana, IPB
- Mantra, I.B., 2004. *Strategi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat*. Depkes RI. Jakarta.
- Mardikanto, T. 1991. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Matheos Nalle. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 2010. *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR)*. Bappeda. Lampung Barat.
- Rakhmat, J. 2001. *Psikologi Komunikasi*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sajogyo, P. 1992. *Sosiologi Pedesaan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Siegel, S. 1988. *Statistik Nonparametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Syarifudin, Ateng. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Pembangunannya*. Mandar Maju . Bandung
- Undang Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125)